



LKjIP 2024

LAPORAN
KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.



Painan, 24 Maret 2025

Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec., Dev.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 19780528 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 telah dapat diselesaikan sebagaimana target waktu yang sudah ditentukan. LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan ini juga menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Prestasi dan keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pemacu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk langkah kedepan. Keberhasilan maupun permasalahan yang masih ada dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Harapan kami semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2024, melalui laporan kinerja ini diharapkan juga adanya optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 21 Maret 2025

BUPATI PESISIR SELATAN




H. HENDRAONI, S.H., M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, sebanyak 10 (sepuluh) indikator nilainya termasuk kategori **Sangat Baik** dan sebanyak 2 (dua) indikator nilainya termasuk kategori **Baik** yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 109,88%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11)*	109,88 *

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024

Sumber : KemenPANRB

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 97,55%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1.	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37
		2.	Pengeluaran per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500	10.211.000	102,59
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2							97,55

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 95,40%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
		2.	Nilai PDRB	Trilyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
		3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3							95,40

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 76,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	persen	2,7	2,06	76,30

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 115,34%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan - Indek Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00	91,57	130,81
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5						115,34

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 97,83%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.1.1	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	1. Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34*	97,83*

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan	3
1.5 Strukur Organisasi	6
1.6 Kepegawaian.....	9
1.7 Sistematika Penyusunan	12
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan	13
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	14
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama	17
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja.....	21
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	23
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	24
3.4. Realisasi Anggaran	126
BAB IV	
PENUTUP	128
4.1. Kesimpulan.....	128
4.2. Saran.....	128
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	4
Tabel 1.2	Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2023-2024.....	5
Tabel 1.3	Data Jumlah PNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024...	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan.....	17
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Katagori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2024.....	23
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024	26
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD.....	27
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi dengan Target/ dengan Standar Nasional Tahun 2024.....	28
Tabel 3.7	Ralisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	31
Tabel 3.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Pembangunan Manusia Tahun 2024.....	34
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Pembangunan Manusia Tahun 2022-2024	36
Tabel 3.10	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2024.....	38
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024	39



Tabel 3.12	Perbandingan Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD	40
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis 4.....	44
Tabel 3.14	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024.....	44
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 - 2024 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 - 2024 dengan Target RPJMD.....	45
Tabel 3.16	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2024	46
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022-2024	50
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD	51
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian indikator Kinerja Indeks Pengeluaran Perkapita Tahun 2024	52
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis 5.....	54
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024	55
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 - 2024	56
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 - 2024 dengan RPJMD.....	57
Tabel 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dengan Target/ Standar Nasional Tahun 2024	57
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024.....	60
Tabel 3.26	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB Tahun 2024	61
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022 - 2024	62
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022 - 2024 dengan Target RPJMD.....	62
Tabel 3.29	Capaian Produksi Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 - 2024.....	64
Tabel 3.30	Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	65
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2024.....	82
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024.....	83
Tabel 3.33	Perkembangan Produksi Perikanan tangkap Tahun 2022-2024.....	84
Tabel 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Produksi Perikanan tangkap Tahun	89
Tabel 3.35		



	2024.....	
Tabel	3.36 Perkembangan Produksi Perikanan tangkap Tahun 2022-2024.....	90
Tabel	3.37 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun 2024	94
Tabel	3.38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun 2022- 2024	95
Tabel	3.39 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022- 2024 dengan target RPJMD	96
Tabel	3.40 Program Pendukung Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	98
Tabel	3.41 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Gini Tahun 2024	99
Tabel	3.42 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024	100
Tabel	3.43 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD	100
Tabel	3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini dengan Target/ Standar Nasional Tahun 2024	101
Tabel	3.45 Realisasi dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024	103
Tabel	3.46 Daftar Kelompok sadar Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	105
Tabel	3.47 Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian indikator Kinerja Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	108
Tabel	3.48 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024.....	109
Tabel	3.49 Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024.....	112
Tabel	3.50 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024	113
Tabel	3.51 Indikator Pilar Indeks Daya Saing daerah Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2023	116
Tabel	3.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022- 2024	117
Tabel	3.53 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD	118
Tabel	3.54 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024	121



Tabel	3.55	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024	122
Tabel	3.56	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024	123
Tabel	3.57	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD	124
Tabel	3.58	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	6
Gambar	1.2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	10
Gambar	1.3	Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024	11
Gambar	3.1	Penyaluran Benih Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan ke kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	68
Gambar	3.2	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani	69
Gambar	3.3	Rahabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2024	70
Gambar	3.4	Penyaluran Pompa Air ke kelompok Tani Se Kabupaten Pesisir Selatan	71
Gambar	3.5	Pelaksanaan Sekolah lapang Pengendalian Hama dan Penyakit (SL-PHT) Tahun 2024	72
Gambar	3.6	Penanaman Sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)	73
Gambar	3.7	Pemangkasan Tanaman Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman	73
Gambar	3.8	Pemantauan Luas Tanam padi sawah menggunakan <i>drone</i>	74
Gambar	3.9	Pendidikan dan Pelatihan Petugas dan Kelompok Tani Tahun 2024	75
Gambar	3.10	Aktivitas Peningkatan Populasi Ternak Unggul melalui inseminasi buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2024	76
Gambar	3.11	Penyaluran Ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	76
Gambar	3.11	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menurut Komponen IDSD	115

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang dimandatkan kepada masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diwujudkan dengan penerapan sistem akuntabilitas. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKjIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun LKjIP Tahun 2024 merupakan Laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat dari lima tahun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyusunan LKjIP ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

1.4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

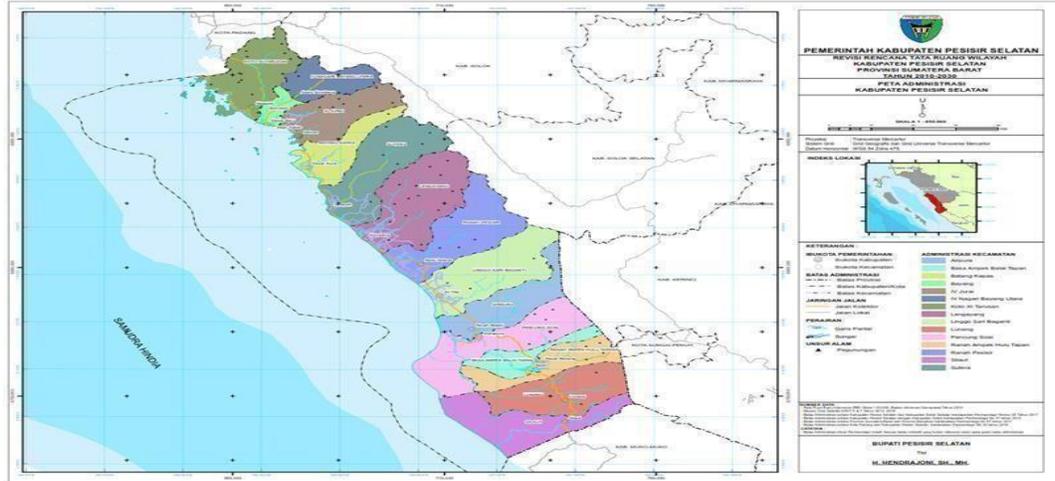
A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, sebelah Timur berbatasan dengan deretan pegunungan Bukit Barisan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Painan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 Km dari Kota Padang-Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan gerbang Selatan Provinsi Sumatera Barat, karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Secara astronomis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di $0^{\circ} 57' 31, 21''$ LS - $2^{\circ} 28' 42, 32''$ LS dan $100^{\circ} 17' 48,64$ BT - $101^{\circ} 17' 34,3$ BT.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Barat, yaitu $\pm 6.049,34$ km², atau 14,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pesisir Selatan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi.

B. Wilayah Administratif



Pada tahun 2024, bentuk wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung	Luas Wilayah	
				(Km2)	(%)
1	Koto XI Tarusan	23	51	437,37	7,71
2	Bayang	17	45	80,92	3.34
3	IV Nagari Bayang Utara	6	17	242,33	0.01
4	IV Jurai	20	52	368,19	0.09
5	Batang Kapas	9	29	277,54	5.59
6	Sutera	12	32	569,81	4.42
7	Lengayang	9	45	632,96	4.46
8	Ranah Pesisir	10	27	562,44	3.30
9	Linggo Sari Baganti	16	43	557,66	2.22
10	Air Pura	10	20	380,10	2.28
11	Pancung Soal	10	24	547,41	0.05
12	Basa Ampek Balai Tapan	10	22	187,46	1.10

13	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	18	281,96	6.60
14	Lunang	10	28	456,73	5.55
15	Silaut	10	27	466,45	7.71
JUMLAH		182	480	6.049,33	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2025

C. Kondisi Demografis

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Sedangkan kondisi demografis ialah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 533.786 jiwa. Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Lengayang dengan jumlah sebanyak 63.731 jiwa dan paling sedikit adalah pendudukan yang berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 8.586 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2023 sampai tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan
Tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	Tahun	
		2023	2024
1	Silaut	16.671	16.437
2	Lunang	23.617	23.266
3	Basa Ampek Balai Tapan	16.324	16.817
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.167	16.421
5	Pancung Soal	27.519	28.229
6	Airpura	19.496	20.390
7	Linggo Sari Baganti	51.027	52.462
8	Ranah Pesisir	34.682	35.270
9	Lengayang	63.607	63.731
10	Sutera	59.025	60.282
11	Batang Kapas	37.982	37.851
12	IV Jurai	52.994	53.664
13	Bayang	43.638	44.790
14	IV Nagari Bayang Utara	8.549	8.586
15	Koto XI Tarusan	54.057	55.590
Kabupaten Pesisir Selatan		525.355	533.786

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun penerbitan, 2025

A. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bagian Organisasi
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bagian Program dan Keuangan
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

3) Dinas Daerah

Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yaitu :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
6. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Perikanan dan Pangan
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

D. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah dibentuk terdiri dari :

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E. Lembaga Lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

F. Pemerintahan Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Kecamatan Bayang
3. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
4. Kecamatan IV Jurai

5. Kecamatan Batang Kapas
6. Kecamatan Sutera
7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Air Pura
12. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
13. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
14. Kecamatan Lunang
15. Kecamatan Silaut

1.6. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 5.239 orang, terdiri dari 1.620 orang laki-laki atau 30,92% dan 3.619 orang Perempuan atau 69,08%, sebagaimana tergambar pada tabel 1.3 dan gambar 1.2 berikut ini :

Tabel 1.3

**Data Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020–2024 Berdasarkan Jenis Kelamin**

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEREMPUAN	LAKI- LAKI
TAHUN 2020	6,506	4,347	2,159
TAHUN 2021	6,334	4,279	2,055
TAHUN 2022	5,918	4,027	1,891
TAHUN 2023	5,621	3,859	1,762
TAHUN 2024	5.239	3.619	1.620

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, per 31 Desember 2024



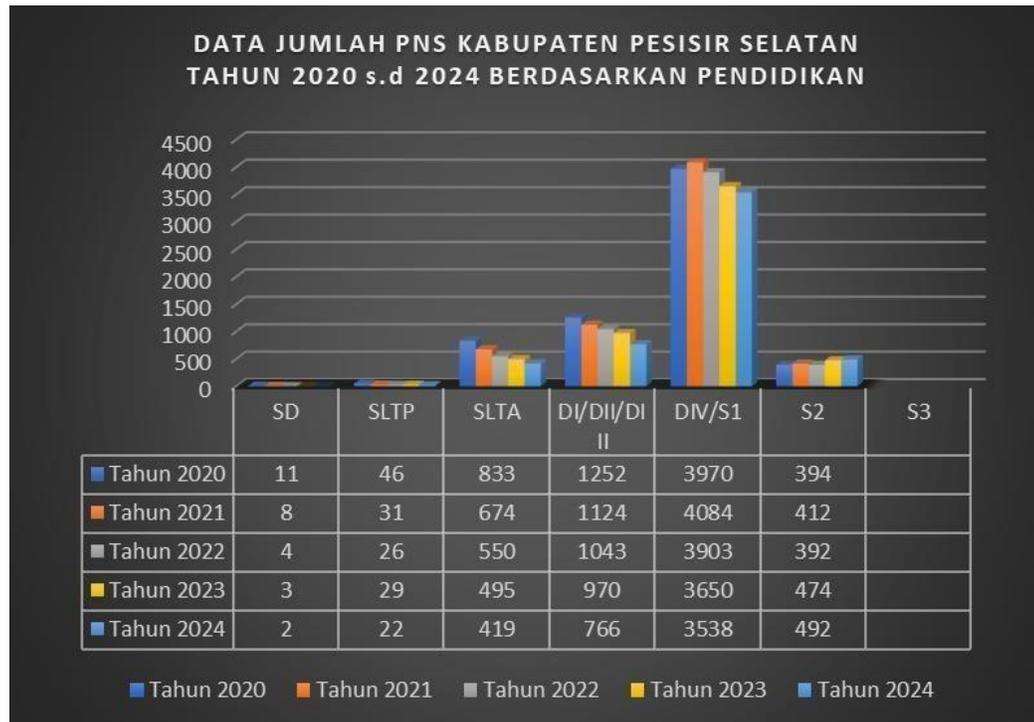
Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenjang pendidikan pendidikan S2 sebanyak 492 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 3.538 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya aparatur, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 766 orang, SMA sebanyak 419 orang, SMP sebanyak 22 orang dan SD sebanyak 2 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dan gambar 1.3 sebagai berikut :

Tabel. 1.4
Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2	S3	
Tahun 2020	11	46	833	1,252	3970	394		6,506
Tahun 2021	8	31	674	1,124	4084	412		6,333
Tahun 2022	4	26	550	1,043	3903	392		5,918
Tahun 2023	3	29	495	970	3650	474		5621
Tahun 2024	2	22	419	766	3538	492		5239

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, 2022, per 31 Desember 2024



Gambar 1.3 : Komposisi Sumber Daya Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2024

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatandan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisi capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi

Visi merupakan gambaran kondisi perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA,
MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- Profesional : Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
VISI
“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Memperkuat Tata Kelola, Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	2.1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat	2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat
		2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	2.3.1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
3	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	3.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan
4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan	4.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat
5	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
		5.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	5.2.1	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis	6.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai,	6.1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Rasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali Revisi. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pertama pada bulan Juli 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah hasil reviu kembali terhadap indikator kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi kesejahteraan masyarakat yang semula Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan, yang sekaligus merubah satuan dan targetnya yaitu semula satuan dan target 6200 orang berubah menjadi 2,7 persen. Revisi kedua pada bulan Oktober 2024 karena adanya Perubahan Anggaran. Perjanjian Kinerja yang telah direvisi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1.1	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	BB (72,00)
2	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,74
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,4
4	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	4.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65
		4.2	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	5.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15
		5.2	Nilai PDRB (AHK)	Triliyun Rupiah	10,879
		5.3	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25

6	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	6.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	Persen	2,7
7	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	7.1	Persentase Pemenuhan8 Standar Pendidikan -Indeks Pencapaian SPM	Tanpa Satuan	70,00
8	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	8.1	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,775)
9	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Damai	9.1	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 ini.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	
				SUMBER DATA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	BB (72,00)	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Hasil evaluasi Kemen PAN RB

2.	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,74	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$IPM = 1/3 [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$ $I \text{ kesehatan} : UHH - UHH \text{ min} UHH \text{ maks} - UHH \text{ min} UHH =$ $Usia \text{ Harapan Hidup} I \text{ pendidikan} : a. I \text{ HLS} = HLS - HLS \text{ min} HLS \text{ maks} - HLS \text{ min} HLS =$ $Harapan \text{ Lama Sekolah} b. I \text{ RLS} = RLS - RLS \text{ min} RLS \text{ maks} - RLS \text{ min} RLS =$ $Rata-Rata \text{ Lama Sekolah} I \text{ pengeluaran} : \ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min}) - \ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})$
3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,4	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$UHH - UHH \text{ min} UHH \text{ maks} - UHH \text{ min}$ $UHH = \text{Usia Harapan Hidup}$
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	Publikasi BPS	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ $Z = \text{garis kemiskinan}$ $Y_i = \text{rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan } (i=1,2,3, \dots, q), y_i < z$ $Q = \text{banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$ $N = \text{jumlah penduduk}$
5.	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang /tahun	9.953.500	Publikasi BPS	$Y^* = Y \text{ IHK} \times 100\%$ $Y^* = \text{Pengeluaran per kapita harga konstan } Y = \text{Pengeluaran per kapita setahun IHK} = \text{Indeks Harga Konsumen tahun dasar}$
6.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	Hasil perhitungan dan Publikasi BPS	$PDRB(t-1) - PDRB(t) PDRB(t) \times 100\%$

7.	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupiah	10,879	Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan atau setiap kategori dari taun ke tahun. PDRB ADHK merupakan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam indikator ini harga tahun 2010 digunakan sebagai dasar penilaiannya
8.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	Publikasi BPS	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Pi = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai indek Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3 =$ ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5 =$ ketimpangan sedang $G > 0,5 =$ ketimpangan tinggi</p>
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	Persen	2,7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah PAD sektor pariwisata dibagi PAD x 100%
10..	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan -Indeks Pencapaian SPM	Tanpa Satuan	70,00	Kemendikbud, Riset dan Teknologi	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot penerima layanan (80%)



11	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,775)	Hasil penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
12	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92	Publikasi BPS	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Sumber: RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKJIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan Perangkat Daerah/laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya ;
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
 - a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11)*	109,88*
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat						
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37
		2. Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500	10.211.000	102,59
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah						
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
		2. Nilai PDRB	Trilyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
		3. Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan						
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	persen	2,7	2,06	76,30

	Kesejahteraan Masyarakat						
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1.	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan - Indeks Pencapaian SPM	Tanpa satuan	70,00	91,57	130,81
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1.	Indendek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*
MISI 6 : Mewejudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
6.1.1	Terciptanya kondisi , Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1.	Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34*	97,83*
Rata-rata Capaian Indikator 9 Sasaran Strategis : 12 Indikator Kinerja							99.26

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 12 (dua belas) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 99,26%, sebanyak 10 (sebelas) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**, sebanyak 2 (satu) indikator nilainya predikat **Baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk mengubah dan meningkatkan kinerja birokrasi atau administrasi pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi harus berdampak, bukan hanya berupa tumpukan kertas, dan reformasi harus menciptakan birokrasi yang cepat dan lincah

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Berikut ini perbandingan antara target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Index Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11)*	109,88*

Catatan: *) HasilEvaluasi Sementara 2024
Sumber : KemenPAN RB

Formulasi capaian indikator kinerja Index Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Index Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah BB (72,00) dan terealisasi BB (79,11)* dengan capaian indikator kinerja adalah 109,88%* yang merupakan Hasil Evaluasi Sementara 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengwas Kementerian PANRB Nomor : B/43/RB.04/2025 Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, karena masih menunggu proses untuk hasil akhirnya. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Capaian Tahun 2024 masih merupakan Hasil Evaluasi Sementara 2024

karena masih menunggu proses untuk hasil akhirnya. Predikat Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Sementara 2024 yaitu “BB” (79,11)* yang menunjukkan capaian Baik, hal ini tercapai karena adanya konsistensi dalam capaian reformasi birokrasi yang merupakan bukti bahwa seluruh komponen di Kabupaten Pesisir Selatan terus bergerak bersama berkolaborasi untuk bereformasi menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Indeks Reformasi pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	58 (CC)	60,5 (B)	72 (BB)	58,82 (CC)	71,56 (BB)	79,11 (BB)*	101,41 %	118,28 %	109,88 %*

Catatan : *) HasilEvaluasi Sementara Tahun 2024Sumber : KemenPAN RB

Dari tabel yang membandingkan realisasi dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama periode 2022-2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan:

- Tahun 2022: Target 58 (CC), realisasi 58,82 (CC), capaian 101,41%
- Tahun 2023: Target 60,5 (B), realisasi 71,56 (BB), capaian 118,28%
- Tahun 2024: Target 72 (BB), realisasi 79,11 (BB), capaian 109,88%

Perbandingan ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023, di mana realisasi melebihi target sebesar 118,28%. Pada tahun 2024, dari Hasil Evaluasi Sementara juga melebihi target yaitu (109,88%), yang mencerminkan kemajuan yang stabil dalam reformasi birokrasi.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	58 (CC)	60,5 (B)	62 (B)	58,82 (CC)	71,56 (BB)	79,11* (BB)

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024
Sumber : KemenPAN RB

Ketika dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026, perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dari yang direncanakan:

Target RPJMD 2024: 62 (B)

Realisasi 2024: 79,11 (BB)

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2024. Lonjakan capaian ini terutama terjadi pada tahun 2023, di mana nilai RB melonjak dari 60,5 (B) ke 71,56 (BB), yang menunjukkan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Target/Standar Nasional

Berikut ini Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan target dan realisasi target /Standar Nasional Tahun 2024.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target/Standar Nasional Tahun
2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024	PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	72 (BB)	70% Kab/Kota Indeks RB \geq Baik	79,11 (BB)*	53,15% Kab/Kota Indeks RB \geq Baik*

Catatan : *) HasilEvaluasi Sementara Tahun2024 dan Data Realisasi Tahun 2023 Sumber : KemenPAN RB

Dari tabel perbandingan dengan target/standar nasional tahun 2024 yang realisasinya masih data tahun 2023, terlihat bahwa nilai realisasi dan target nasional sudah tercapai 53,15 % Kab/Kota Indeks RB \geq Baik, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk yang sudah tercapai karena Kabupaten Pesisir Selatan Indeks RB Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024 adalah 79,11 (BB) atau Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menyesuaikan reformasi birokrasi dengan standar nasional, yang mencerminkan implementasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat.

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan.

Faktor Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Kebijakan dan regulasi penajaman Roadmap Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dengan Roadmap Nasional.

- b. Menyusun Rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai bagian upaya perbaikan dari birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik.
- c. Komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi baik RB General maupun RB Tematik yang meliputi tematik Kemiskinan, Stunting, Investasi dan inflasi
- d. Monitoring ex-ante dan on-going sebagai bagian dari percepatan capaian Reformasi Birokrasi.
- e. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang lebih sistematis sejak tahun 2023.
- f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, baik dalam hal kompetensi maupun budaya kerja yang lebih adaptif.
- g. Penerapan sistem digitalisasi administrasi yang semakin efektif dalam mendukung layanan publik.
- h. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk regulasi maupun asistensi teknis.

Faktor Penyebab Kegagalan:

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Kebijakan dan Keterbatasan anggaran serta SDM dalam implementasi reformasi birokrasi di sebagian kecil perangkat daerah.
- b. Resistensi terhadap perubahan dari beberapa elemen birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem lama.
- c. Tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat yang terus berkembang.

Solusi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran
 - 1) Peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur.
 - 2) Efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk reformasi birokrasi.
- b. Penguatan sistem digitalisasi birokrasi
 - 1) Peningkatan integrasi sistem digital dalam pelayanan publik.

- 2) Penerapan e-government untuk mempermudah akses dan transparansi layanan.
- c. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat
Penguatan forum komunikasi dan sinergi dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, didorong oleh kebijakan meliputi:

1. Pengalokasian anggaran dengan standar belanja berbasis program yang mendukung sasaran dan tujuan pembangunan.
2. Strategi dan Kebijakan perencanaan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja;
3. Penerapan Penyederhanaan /Perubahan Struktur Organisasi;
4. Percepatan kinerja dengan Inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi ini sebesar Rp. 311.837.805.854,-, dengan realisasi sebesar Rp. 294.578.863.930,- atau sebesar 94,46 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.258.941.924,- atau 5,54 %.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian
Indikator Kinerja Index Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	794.411.883	790.586.471	3.825.412	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.607.138.270	18.721.035.987	8.886.102.283	APBD
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	399.990.934	377.095.800	22.895.134	APBD
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.540.552	109.018.850	2.521.702	APBD
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	274.423.047.697	267.248.873.692	7.174.174.005	APBD
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	974.979.242	449.242.836	525.736.406	APBD
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.858.743	1.180.280.903	21.577.840	APBD
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	831.384.300	702.629.759	128.754.541	APBD
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	158.367.000	141.552.849	16.814.151	APBD
10	Program Kepegawaian Daerah	833.227.859	805.490.306	27.737.553	APBD
11	Program	53.506.740	53.038.600	468.140	APBD



	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
12	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	999.993.629	823.023.763	176.969.866	APBD
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	39.993.000	35.086.900	4.906.100	APBD
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian	12.850.000	10.124.200	2.725.800	APBD
15	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti	51.085.000	48.418.950	2.666.050	APBD
16	Program Penetapan Tanah Ulayat	41.805.800	35.229.450	6.576.350	APBD
17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	991.743.136	836.287.101	155.456.035	APBD
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.138.592.627	2.076.757.463	61.835.164	APBD
19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	114.709.640	78.344.800	36.364.840	APBD
20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.579.802	56.745.250	834.552	APBD
Total		311.837.805.854	294.578.863.930	7.258.941.924	

Penghargaan

Adapun prestasi yang di peroleh adalah Piagam Opini BPK dari Tahun 2012-2024, WTP ke 11 (sebelas) kali



Tingkat Kepatuhan Standar Pelayan Publik tahun 2024 yaitu 92.70 Zona Hijau, Kategori A, Kualitas Tertinggi



Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) (indikator kinerja) yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat/ pengeluaran. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini ditetapkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kaitannya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, sistem pendidikan yang baik dan bermutu, tingkat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building) serta diperkuat nilai nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sbagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Pembangunan Manusia

$$IPM = 1/3 [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$$
$$I \text{ kesehatan} : \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

$$I \text{ pendidikan} : \text{a. } I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

$$\text{b. } I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

$$I \text{ pengeluaran} : \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.8. di atas dapat dijelaskan target Indikator Kinerja Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 72,74 dan realisasi 72,87 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,18%. Berdasarkan klasifikasi penilaian Indikator Kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM merupakan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup

pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Pembangunan Manusia	Tanpa satuan	71,22	71,39	72,74	71,25	71,52	72,87	100,04	102,34	100,18

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan target 72,74 terealisasi sebesar 72,87, dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2023 yaitu target 71,39 realisasi 71,52 dan pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25. Dengan capaian ini artinya Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia adalah :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan melalui bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
- 2.

3. Peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan kepemimpinan, infrastruktur dan proses pembelajaran.
4. Peningkatan fasilitas berusaha serta mengadakan pendidikan dan pelatihan usaha.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

1. Pendistribusian guru yang belum merata dan belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan.
2. Rendahnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan di dunia kerja.
3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan.
4. Belum optimalnya penerapan IPTEK.
5. Belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
6. Belum semua Perangkat Daerah mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Disparitas sumber daya kesehatan di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.
8. Belum semua fasilitas kesehatan memenuhi standar.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan angka harapan lama sekolah
2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah
3. Meningkatkan Usia harapan hidup
4. Stabilisasi dan kontrol inflasi, melakukan pemantauan stabilisasi harga komoditas perdagangan
5. Peningkatan aktifitas ekonomi

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai serta Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai. Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan, keterkaitan antara

Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 mengalami efisiensi sebesar Rp. 9.277.687.601,- atau 8,04%. Efisiensi tersebut dilakukan pada beberapa kegiatan diantaranya program pada dinas kesehatan serta dinas pendidikan dan kebudayaan.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia adalah 3 (tiga) program yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp.112.617.191.729,- dengan realisasi Rp.103.891.734.266 atau capaian 92,25%. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran Rp.1.268.527.540,- dengan realisasi Rp.1.087.251.260,- atau capaian 85,71%. Program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp.1.521.349.107,- dengan realisasi Rp.1.150.395.249,- atau capaian 75,62%. Total anggaran dari 3 (tiga) program tersebut adalah Rp.115.407.068.376,- dengan realisasi Rp.106.129.380.775,- atau capaian 91,96% . Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9.277.687.601,- atau 8,04%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan
Hidup Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05

$$\frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Usia Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 73,4 dan terealisasi 73,44 dengan capaian indikator kinerja adalah 100,05%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pencapaian Usia Harapan Hidup merupakan salah satu keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan hal ini dapat diartikan bahwa salah satu faktor Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan cita-cita salah satu misi serta penunjang terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita visi Bupati mulai terlihat pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pencapaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks Usia Harapan Hidup tahun 20221 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	tahun	71,22	71,39	73,4	71,25	71,52	73,44	100,04	100,18	100,05

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan target 73,4 terealisasi sebesar 73,44, dibandingkan dengan target dan

realisasi pada tahun 2023 yaitu target 71,39 realisasi 71,52 dan pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 capaiannya melebihi target. Dengan capaian ini artinya kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi

Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,39	71,57	71,25	71,52	73,44

Realisasi Indikator Kinerja “Usia Harapan Hidup” pada tahun 2022 yaitu 71,22 Tahun dengan target RPJMD sebesar 71,22 Tahun, realisasi tercapai dengan sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 71,52 Tahun dengan target RPJMD 71,39 Tahun dan begitu juga dengan tahun 2024 realisasi kinerja meningkat dengan signifikan menjadi 73,44 Tahun dengan target RPJMD 71,57 Tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator usia Harapan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan deteksi dini penyakit tidak menular.

2. Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Meningkatkan akses terhadap pelayanan Kesehatan
4. Memotivasi peran kader dalam meningkatkan Kesehatan ibu dan anak.
5. Adanya komunikasi yang efektif antar puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan melalui pelatihan.
7. Meningkatkan peran Masyarakat terhadap Kesehatan.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan

sasaran Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pola hidup sehat.
2. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
3. Status kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang masih rendah.
4. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
5. Belum meratanya jumlah, jenis dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
6. Masih adanya angka stunting.

Solusi

Peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Pesisir Selatan akan terus diupayakan melalui upaya berikut ini

1. Menekan Angka Kematian Ibu melahirkan dan mencegah peningkatan Angka Kematian Bayi, dengan memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dimana 2 kali diantaranya dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan 10 T, memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi dan konseling kehamilan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil yang diadakan minimal 4 kali dalam setahun di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil telah memiliki buku KIA, memastikan semua bidan desa dikoordinatori oleh puskesmas untuk melaksanakan pemantauan wilayah setempat pada ibu hamil di wilayah kerjanya dan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang mengalami kondisi penyulit .
2. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Sumber daya kesehatan mencakup tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dana, dan infrastruktur kesehatan

3. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Sistem Informasi Keluarga.

Keluarga sebagai komponen dari masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan dimasa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi, dan social. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia yang ditujukan agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehamilan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke,

penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas, atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat,

karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Indikator Usia Harapan Hidup ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Kesehatan dengan Jumlah anggaran Rp. 113.885.719.269,- dengan realisasi Rp. 104.978.985.526,- atau capaian 92,18 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.8.906.733.743,- atau 7,82 %.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Usia Harapan Hidup. Indikator kinerja Usia Harapan Hidup ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp.112.617.191.729,- dengan realisasi Rp. 103.891.734.266,- atau capaian 92,26 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp.1.268.527.540,- dengan realisasi Rp.1.087.251.260,- atau capaian 85,71 %.

Sasaran 4 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37

2.	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/ tahun	9.053.500	10.211.000	102,59
Rata-rata Capaian					94,98

Dari tabel 3.13. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 94,98%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan isu penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat dapat diatasi, maka tujuan Pesisir Selatan bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	persen	6,65	7,49	87,37

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 6,65 dan terealisasi 7,49 dengan capaian indikator kinerja adalah 87,37%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka, kemiskinan proventy tahun 2024 yaitu 7,49%. Untuk menentukan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, BPS Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan rumus jumlah penduduk yang total konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, di bagi dengan jumlah penduduk keseluruhan, dan kemudian di kali 100. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan tercapai < 100%. Pencapaian ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Tingkat Kemiskinan
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	persen	7,2	6,9	6,65	7,11	7,34	7,49	101,27	93,62	87,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung semakin meningkat. Di tahun 2022, realisasi persentase penduduk miskin adalah 7,11% , realisasi tahun 2023 adalah 7,34%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 7,49% persen. Dalam tiga

tahun terakhir, target kinerja hanya tercapai pada tahun 2022 capaiannya 101,27 %, sedangkan di tahun 2023 adalah 93,62% dan 2024 adalah 87,37% Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,2	6,9	6,65	7,11	7,34	7,49

Dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung semakin meningkat. Di tahun 2022, persentase penduduk miskin adalah 7,11 persen, sedangkan di tahun 2024 sebesar 7,49 persen. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja terhadap target RPJMD hanya tercapai pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 dan 2024 target kinerja terkait tingkat kemiskinan tidak sesuai dengan target.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan **Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan konsolidasi data sasaran penduduk miskin. Proses konsolidasi menyepakati penggunaan Satu Data dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
2. Mengurangi beban pengeluaran adalah guna memastikan setiap sasaran mendapatkan program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial dan program sejenis yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (kurang mampu).
3. Meningkatkan pendapatan keluarga, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah mendorong akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar kapasitas SDM masyarakat miskin dapat lebih meningkat.
4. Melakukan Intervensi program terhadap sektor UMKM, karena makin berkembang sektor UMKM serapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat.

5. Pemanfaatan program ketahanan pangan pada Pemerintah Nagari yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
6. Mengurangi kantong kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Terjadinya Bencana alam dan masih kurangnya edukasi terkait kebencanaan serta upaya mengurangi risiko bencana
2. Belum maksimalnya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
3. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.
4. Penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan
5. Mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan
6. Dukungan anggaran pengentasan kemiskinan yang masih terbatas

Solusi

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain :

1. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan memberikan edukasi terkait kebencanaan berdasarkan karakteristik kondisi lingkungan, kesiapsiagaan bencana dan teknik evakuasi Adanya unsur relawan/expert di bidang penanganan bencana yang terlibat yaitu : Tagana, BPBD, Damkar, PMI dan melibatkan seluruh unsur desa serta PD lainnya yang terkait.
2. Memaksimalkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pendampingan dan bimbingan.
4. menginventarisir dan memvalidasi jumlah masyarakat miskin by name by address (P3KE).
5. Melakukan penguatan tata kerja TKPKD Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah, melalui penyusunan RPKD, Dokumen Rencana penanggulangan Kemiskinan Daerah rencana Aksi Tahunan, RAT Kemiskinan dan RAT Penghapusan kemiskinan ekstrim.
6. Melakukan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor

- meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kemiskinan.
7. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 8. Melaksanakan pendidikan agar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Selain itu, melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan peluang ekonomi yang ada.
 9. Penyusun program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan ditunjang oleh Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, nanganan Bencana, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Jumlah anggaran Rp2.589.017.317,- dengan realisasi Rp.2.367.906.093,- atau capaian 91,46 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.221.111.224,- atau 8,54%.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan didukung oleh beberapa program dan Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.307.304.476 dan terealisasi sebesar Rp.2.082.080.223 dengan rincian program yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan target anggaran Rp.176.280.474,- dan realisasi sebesar Rp.123.098.834 atau capaian 69,83%
2. Program Penanganan Bencana dengan target anggaran Rp.341.595.474 dan realisasi sebesar Rp.266.903.984 atau capaian 78,13%.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target anggaran Rp.178.933.195 dan realisasi sebesar Rp. 133.659.992 atau capaian 74,70%.
4. Program Pemberdayaan Sosial dengan target anggaran Rp.1.610.495.333 dan realisasi sebesar Rp. 1.558.417.413 atau capaian 96,77%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung indikator Tingkat Kemiskinan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.225.224.253 atau 9,76%.

2. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka- angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran yang harus dicapai untuk meningkatnya Tingkat kesejahteraan Masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9.953.500	10.211.000	102,59

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2024 :	$\frac{Rp.10.211.000}{Rp.9.953.000} \times 100\% = 102,59\%$
--	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pendapatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, pengeluaran per Kapita Masyarakat Pesisir Selatan berada diatas target yaitu dengan capaian 102,59% atau realisasi Rp. 10.211.000/ tahun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan nilai PDRB dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Pengeluaran Per Kapita pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang	9.325.	9.369.	9.953.	9.686.	9.953.	10.211.	103,87%	106,23%	102,59%
	/ tahun	000	000	500	000	000	000			

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian kinerja pengeluaran per kapita mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2024, yaitu naik menjadi 106,23% pada tahun 2023 dan turun menjadi 102,59% pada tahun 2024. Tetapi dari tahun ke tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan, ini artinya pengaruh faktor lain diluar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan juga berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita Masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya, diantaranya gaya hidup yang berpengaruh pada kebutuhan, pengetahuan, peluang, hingga pengangguran dan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergitas subsektor ekonomi dalam pengendalian pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/ tahun	9.325. 000	9.369. 000	9.534. 000	9.686. 000	9.953. 000	10.211. 000

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2022-2024 pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari tahun ke tahun. Peran koordinasi dan sinergitas pemerintah subsector ekonomi sangat diperlukan dalam pengendalian pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor mendorong pengeluaran per kapita adalah :

1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan belum begitu optimal
2. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsektor lingkup ekonomi belum optimal
3. Bertambahnya pendapatan masyarakat.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat.
5. Stabilitasnya inflasi menguatkan daya beli masyarakat hingga ekonomi berputar dinamis.
6. Membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
7. Peningkatan Aktivitas Ekonomi, meningkatnya pengeluaran konsumen dan investasi, itu bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat;

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mendorong pengeluaran per kapita antara lain :

1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan belum begitu optimal
2. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsektor lingkup ekonomi belum optimal
3. Kurangnya lapangan kerja.
4. Kurangnya sumber daya yang berkualitas.
5. Kurangnya adaptasi teknologi.

Solusi

1. Rapat Koordinasi terkait penanggulan inflasi setiap minggunya
2. Membentuk tim P3DN sebagai langkah penguatan daya saing produk lokal
3. Menciptakan Lapangan kerja.
4. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Peningkatan dukungan teknologi dalam budidaya tanaman pertanian dan pendampingan melalui peningkatan kompetensi petani, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan terpadu, serta optimalisasi peran penyuluh pertanian

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan Anggaran

1. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
2. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Total anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pengeluaran per kapita dengan total anggaran Rp 13.782.947.428, dengan realisasi sebesar Rp 13.452.188.365 atau capaian 97,60 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp330759.063 atau 2,40%.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator
Kinerja Indek Pengeluaran per Kapita Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROG. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.007.630	33.942.500	65.130	APBD
2	PROG. PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	884.675.048	882.974.100	1.700.948	APBD
3	PROG. STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	29.499.610	26.926.050	2.573.560	APBD
4	PROG. STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	283.356.097	276.119.472	7.236.625	APBD
5	PROG. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
6	PROG. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
7	PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	89.999.888	89.859.089	140.799	APBD
		13.782.947.428	13.452.188.365	330.759.063	

**Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi secara Berkelanjutann**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 3 (indikator kinerja), dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.21
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
2.	Nilai PDRB	Trilyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
Rata-rata Capaian					95,40

Dari tabel 3.15. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 95,40%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan ekonomi yang didukung oleh tingkat produktivitas dan daya saing potensi unggulan serta meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa capaian kinerja Pertumbuhan ekonomi yaitu 74,56% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, rencana pemerintah terhadap kenaikan laju perekonomian pada tahun 2024 tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sesuai harapan, seperti stabilitas ekonomi

dalam

penanggulangan inflasi dan krisis pangan karena el nino, sehingga harapan pertumbuhan ekonomi yang akan naik secara progresif tahun 2024 belum dapat dicapai sesuai angka yang ditargetkan

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,89	4,85	5,15	4,02	4,19	3,84	139,10%	86,39%	74,56%

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun nilai realisasi PDRB sendiri yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi telah kembali bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan target, namun harapan pemerintah terhadap progresivitas pertumbuhan ekonomi masih belum sesuai harapan.

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Kontribusi beberapa lapangan usaha sektor ekonomi belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum sesuai target.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,89	4,17	4,52	4,02	4,19	3,84

Pertumbuhan ekonomi mengalami naik turun dari tahun 2022-2024. Hal ini berarti kolaborasi dan kontribusi lapangan usaha sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lingkup ekonomi masih belum bersinergi dengan baik dan optimal.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional.

Berikut ini Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dengan target dan realisasi

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi dengan Target/Standar Nasional
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024
		PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024		
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	6,2	3,84	5,05*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Analisis penyebab sama halnya dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 juga berada dibawah target yang direncanakan, dengan realisasi 5,05%.

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan juga ditopang dari kontribusi pertumbuhan investasi.
2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, menciptakan Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang kondusif pada Tahun 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan berinvestasi merupakan suatu prioritas penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik bagi investor
3. Mengoptimalkan promosi penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman modal melalui media promosi investasi potensial di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pelaku usaha atau investor berminat.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Memperkuat infrastruktur untuk membangun ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi terfokus pada sektor perdagangan dan Perindustrian, sektor lain penunjang ekonomi terbesar lainnya seperti pertanian, konstruksi, Pendidikan dan jasa lainnya tidak begitu optimal dan stabil, hanya meningkat perlahan dan tidak begitu signifikan dibanding dengan kondisi sebelum covid-19
2. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak begitu optimal

3. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsector lingkup ekonomi belum optimal

Solusi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain

1. Terus mengoptimalkan sumber sumber investasi dengan melakukan pengendalian pelaksanaan permodalan dengan peningkatan kondusifitas wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pengembangan dan peningkatan program-program cakupan pemberdayaan UMKM.
3. Peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan dan mendorong kolaborasi perangkat daerah dengan semua sektor di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengoptimalkan keunggulan dan potensi Pesisir Selatan, peningkatan efisiensi dengan teknologi informasi dan komunikasi, Melakukan analisis dan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang baru dan tren ekonomi.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran

Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian serta Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM

Total anggaran urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 18.353.211.072, dengan realisasi sebesar Rp 17.625.105.410 atau capaian 96,03 %

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 3,97 %

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan keterkaitan antara sasaran, indikator dan program dengan target dengan realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Prog. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	34.007.630	33.942.500	65.130	APBD
2	Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	884.675.048	882.974.100	1.700.948	APBD
3	Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	29.499.610	26.926.050	2.573.560	APBD
4	Prog. Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	283.356.097	276.119.472	7.236.625	APBD
5	Prog. Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
6	Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
	Jumlah	13.692.947.540	13.362.329.276	330.618.264	

2. Nilai PDRB (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi, dan nilai ini biasanya dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.27 berikut ini :

Tabel 3.27
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK)

Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 10,879 dan terealisasi 11,015 dengan capaian indikator kinerja adalah 101,25%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) tahun 2024 sampai dengan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.27 di bawah ini.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupian	9,992	10,409	10,879	10,181	10,608	11,015	101,89	101,91	101,25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan jumlah realisasi Nilai PDRB (ADHK) dari tahun 2022 mengalami kenaikan. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.28 di bawah ini.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupian	9,992	10,409	10,879	10,181	10,608	11,015

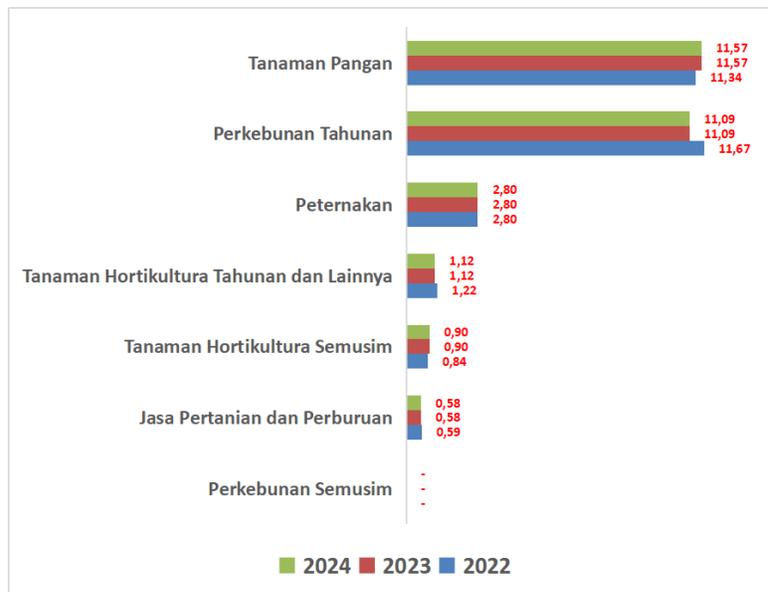
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ada kenaikan jumlah realisasi Nilai PDRB (ADHK), Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi peningkatan Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Pesisir



Selatan yang paling tinggi yaitu di angka 28,06 persen pada Tahun 2023. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman

hortikultura semusim, jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian nilai PDRB sektor pertanian tidak terlepas dari capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Capaian produksi pertanian di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024

No	Komoditi	Satuan	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6
1	Padi	Ton	161.639	201.974,00	167.598,08
2	Jagung	Ton	208.011	147.741,00	127.921,37
3	Cabe Merah	Ton	5.042	4.975,05	3.841,46
4	Bawang Merah	Ton	146	453,25	71,05
5	Durian	Ton	18.482	16.025,10	20.741,10
6	Manggis	Ton	4.695	3.373,70	3.482,10
7	Jeruk	Ton	4.465	4.412,20	3.866,10
8	Jengkol	Ton	5.747	6.297,20	8.207,70
9	Kelapa Sawit	Ton	79.850	77.352,07	78.124,30
10	Kelapa Dalam	Ton	3.154	3.509,26	3.471,69
11	Kopi	Ton	2.373	2.506,22	2.510,08
12	Gambir	Ton	5.944	5.667,61	7.271,46
13	Pala	Ton	912	1.007,18	1.065,66
14	Daging Sapi	Ton	1.811	1.687	1.570,32
15	Daging Kerbau	Ton	63	53	37,29
16	Daging Kambing	Ton	36	36	18,14
17	Daging Ayam	Ton	4.607	2.973	2.906,34
18	Daging Itik	Ton	128	299	90,99
19	Telur Ayam	Ton	1.199	920	844,85
20	Telur Itik	Ton	1.197	2.790	849,58
	Jumlah	Ton	509.500	484.051,84	434.489,66*

Catatan : *) Angka Sementara (ASEM) Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan mulai dari yang terbesar yaitu durian, manggis, jengkol, kelapa sawit, kopi, gambir dan pala. Komoditi yang mengalami penurunan yang terbesar adalah padi dan jagung serta komoditi lainnya. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.31

Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasan g Surut (Ha)	Leba k (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681	610,41	-	-	1.291,41
3	BAB Tapan	1.020,89	129	-	-	1.149,89
4	Rahul Tapan	721,30	18	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300	-	33	2.930,58
10	Sutera	1.828	866,91	7	19	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	-	-	2.106,19
14	Bayang Utara	398	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	-	-	1.966,75
Jumlah		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, diolah

2. Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*)

Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh

tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan

kelembaban udara memiliki dampak besar pada produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

a) **Pemilihan Varietas Unggul**

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan

Pessel

dan Jengkol Barih Pessel. Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

b) Pemberian Pupuk yang Tepat

Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan

nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.

c) Pengelolaan Tanah yang Baik

Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 3.2 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier

Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan

jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.3 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2024

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan. Aktivitas-aktivitas penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.4 dibawah ini :



Gambar 3.4 : Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.

e) Pengendalian Hama dan Penyakit

Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan. Aktivitas-aktivitas Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit pada Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5 : Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit (SL-PHT) Tahun 2024

f) Praktik Penanaman yang Tepat

Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 3.6 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

g) Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada Gambar 3.24 dibawah ini :



Gambar 3.7: Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

h) Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam

tanaman pangan seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 3.8 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone

- i) Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem
Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.
- j) Pelatihan dan Pendidikan
Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan Petani/kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada

Gambar dibawah ini :



Gambar 3.9 : Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2024

3. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan bantuan ternak ke peternak. Aktivitas Inseminasi Buatan oleh Inseminator dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.10: Aktivitas peningkatan populasi ternak unggul melalui Inseminasi Buatan (IB) oleh Inseminator Tahun 2024

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 3.11 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Indikator ini ditunjang oleh program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Realisasi program untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah sebesar Rp.12.966.431.673,00 atau 83,40% dari total anggaran sebesar Rp.15.547.249.967,00, sehingga ada

efisiensi anggaran sebesar 16,60%.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor Penyebab kegagalan pencapaian Kinerja Nilai PDRB (ADHK) adalah :

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.
4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.
5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.
6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.
7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.
10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.
16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai PDRB (ADHK) antara lain :

1. Meningkatkan Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian
3. Meningkatkan pendapatan petani/peternak.
4. Optimalisasi Produktivitas Pertanian.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
7. Optimalisasi Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
8. Perlindungan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi Lahan.
9. Peningkatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
10. Meningkatkan Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
11. Menurunkan Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
12. Meningkatkan nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
13. Optimalisasi Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
14. Meningkatkan kebutuhan benih ternak unggul.
15. Optimalisasi penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Piagam Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2024

1. BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) BERPRESTASI I TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN BPP TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT



2. PENYULUH PERTANIAN PNS BERPRESTASI II TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENINGKATAN SDM PERTANIAN TINGKAT PROVINSI



3. Juara II Kerbau Betina Dalam Rangka Kontes Ternak dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Payakumbuh



5. JUARA III SAPI PESISIR JANTAN
DALAM RANGKA KONTES TERNAK
DAN LIVESTOCK EXPO TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024 DI PAYAKUMBUH



7. JUARA III SAPI PESISIR BETINA
DALAM RANGKA KONTES TERNAK
DAN LIVESTOCK EXPO TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024 DI PAYAKUMBUH



Dokumentasi Penyerahan Sertifikat dan Tropy Pemenang Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi dan BPP Berprestasi



Penyerahan Sertifikat dan Tropy Pemenang Kontes Ternak



Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, didorong oleh kebijakan meliputi:

1. Pengalokasian anggaran dengan standar belanja berbasis program yang mendukung sasaran dan tujuan pembangunan.
2. Strategi dan Kebijakan perencanaan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja;
3. Penerapan Penyederhanaan /Perubahan Struktur Organisasi;
4. Percepatan kinerja dengan Inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja nilai PDRB (ADHK) ini sebesar Rp.15.547.249.967,- dengan realisasi sebesar Rp.12.965.331.673,- atau sebesar 83,39 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.581.918.294,- atau 16,61%.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) dapat dilihat pada tabel 3.32 di bawah ini.

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	936.389.611	817.743.484	87,33	APBD
2	Penyediaan dan Pengembangan	3.618.429.526	2.341.545.966	64,71	APBD

	Prasarana Pertanian				
3	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	632.472.830	516.322.320	81,64	APBD
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	243.358.000	178.831.620	73,48	APBD
5	Penyuluhan Pertanian	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06	APBD
Jumlah		15.547.249.967	12.965.331.673	83,39	

Produksi Ikan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024, maka ditetapkan indikator kinerja berdasarkan Urusan Perikanan dan Pangan yang menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja ini merujuk kepada indikator kinerja yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya.

a. Produksi Perikanan Tangkap

Perbandingan antara target dan realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.33 berikut ini :

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024

Uraian	Satuan	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan Tangkap	ton	36.480	46.334,68	128,40

Secara keseluruhan tabel di atas menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap pada tahun 2024 mengalami performa yang sangat baik. Realisasi produksi tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, serta potensi besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

1. Target Produksi :

Target produksi perikanan tangkap yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah **36.480 ton**. Angka ini mencerminkan harapan atau rencana produksi yang ingin dicapai oleh sektor perikanan tangkap pada tahun tersebut.

2. Realisasi Produksi :

Realisasi produksi pada tahun 2024 mencapai **46.334,68 ton**, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil produksi aktual melebihi ekspektasi yang direncanakan.

3. Capaian :

Capaian persentase pada tahun 2024 adalah 128,40%, yang berarti realisasi produksi melebihi target sebesar 28,40%. Angka ini menggambarkan keberhasilan sektor perikanan tangkap dalam mencapai dan melampaui target produksi.

Tabel 3.34

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.727	35.906	36.480	35.907	58.405	46.334,68	100,50	162,66	128,40

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2022 hingga 2024.

Meskipun

ada fluktuasi dalam realisasi produksi, capaian persentase selalu melampaui target, terutama pada tahun 2023 yang mencatat lonjakan signifikan. Hal ini mencerminkan potensi besar sektor perikanan tangkap serta efektivitas dalam

pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan. Namun, penurunan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mempertahankan stabilitas produksi di masa mendatang.

1. Target Produksi

Target produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya:

- Pada tahun 2022, target ditetapkan sebesar **35.727 ton** .
- Pada tahun 2023, target meningkat menjadi **35.906 ton** .
- Pada tahun 2024, target kembali naik menjadi **36.480 ton** .

Peningkatan target ini mencerminkan harapan pemerintah atau pemangku kepentingan terhadap peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap dari tahun ke tahun.

2. Realisasi Produksi

Realisasi produksi menunjukkan hasil aktual yang dicapai oleh sektor perikanan tangkap:

- Pada tahun 2022, realisasi produksi adalah **35.907 ton** , sedikit melampaui target.
- Pada tahun 2023, realisasi produksi melonjak signifikan menjadi **58.405 ton** , jauh melebihi target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2024, realisasi produksi mencapai **46.334,68 ton** , masih melampaui target meskipun tidak setinggi lonjakan pada tahun 2023. Realisasi produksi yang fluktuatif ini menunjukkan dinamika dalam aktivitas penangkapan ikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim tangkap, teknologi, atau kondisi lingkungan.

3. Capaian Persentase

Capaian persentase menggambarkan sejauh mana target produksi dapat dicapai setiap tahunnya:

- Pada tahun 2022, capaian mencapai **100,50%**, menunjukkan bahwa realisasi sedikit melampaui target.
- Pada tahun 2023, capaian melonjak tajam menjadi **162,66%**, mencerminkan performa luar biasa dalam penangkapan ikan.
- Pada tahun 2024, capaian turun menjadi **128,40%**, tetapi masih menunjukkan bahwa realisasi produksi melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari upwelling yang terjadi di perairan laut. Dimana Upwelling (pembalikan massa air) adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena ini membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan tersebut. Peningkatan biomassa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut.

Karena air dari kedalaman yang dibawa ke permukaan seringkali mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, upwelling pada pesisir dapat membantu pertumbuhan rumput laut dan plankton. Selanjutnya, rumput laut dan plankton menjadi penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan, mamalia laut, dan burung-burung di daerah tersebut. Dan itu telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 36.480 ton dengan tingkat capaian 128,40 %. Capaian indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan antara lain:

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel,

mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.

2. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
 - b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan
4. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil skala kecil

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Faktor Keberhasilan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan tangkap :

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Dukungan kebijakan pemerintah seperti penyediaan alat tangkap modern, pelatihan nelayan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi.
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan.
4. Pada tahun 2023 dan 2024 lonjakan produksi kemungkinan besar dipengaruhi oleh optimalisasi musim tangkap, di mana kondisi cuaca dan populasi ikan mendukung peningkatan hasil tangkapan

Faktor Penyebab kegagalan

Hambatan yang masih ditemui dalam Upaya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah :

1. Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu.

2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di terairan umum.
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative
5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

Solusi

Upaya ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis jumlah produksi perikanan antara lain :

1. Peningkatan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap.
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan Budidaya tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu Lele, Nila, Gurame, Udang Vaname, Ikan Mas dan Kerapu dan lain-lain. Capaian produksi perikanan budidaya ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari bantuan yang diberikan kepada pembudidaya ikan memberikan dampak positif meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya.

Tabel 3.35
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2024

Uraian	Satuan	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan Budidaya	ton	14.608	14.608	100,00

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa sektor perikanan budidaya pada tahun 2024 berjalan sesuai rencana, dengan realisasi produksi yang tepat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan

1. **Target Produksi :**

Target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah **14.608 ton** . Angka ini mencerminkan harapan atau rencana produksi yang ingin dicapai oleh sektor perikanan budidaya pada tahun tersebut.

2. **Realisasi Produksi :**

Realisasi produksi pada tahun 2024 adalah **14.608 ton** , yang berarti bahwa hasil produksi aktual tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. **Capaian:**

Capaian persentase pada tahun 2024 adalah **100,00 %** , menunjukkan bahwa realisasi produksi berhasil mencapai target secara penuh tanpa kekurangan atau kelebihan

Tabel 3.36

Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.250	13.913	14.608	14.278	14.490	14.608	107,76	104,15	100,00

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya mengalami perkembangan yang stabil dan berhasil mencapai target produksi pada tahun 2024, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya realisasi cenderung melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan sektor ini dalam memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi produksi.

1. **Target Produksi :**

Target produksi perikanan budidaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target ditetapkan sebesar **13.250 ton** , kemudian naik menjadi **13.913 ton** pada tahun 2023, dan mencapai **14.608 ton** pada tahun 2024.

2. **Realisasi Produksi :**

Realisasi produksi juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022, realisasi produksi adalah **14.278 ton** , melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai **14.490 ton** , dan pada tahun 2024, realisasi produksi tepat sesuai target yaitu **14.608 ton** .

3. **Capaian**

Capaian persentase menggambarkan sejauh mana target produksi dapat dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian mencapai **107,76%** , menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi **104,15%** , tetapi masih melampaui target. Pada tahun 2024, capaian persentase adalah **100,00%** , yang berarti realisasi produksi tepat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Faktor Keberhasilan

1. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.

Faktor penyebab kegagalan

Hambatan yang dihadapi dari capaian sasaran strategis

1. Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
3. Kurangnya permodalan pembudidaya untuk pengembangan budidaya ikan
4. Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya.
5. rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
6. Masih sulitnya pemasaran membuat pembudidaya kurang berkembang karena masih bersifat lokal.
7. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
8. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.

Solusi

Upaya yang dilakukan

1. Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan

2. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
3. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha
4. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, temu tekins hama dan penyakit ikan
5. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat
6. Pendampingan oleh tenaga pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) agar pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal
7. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan.

Untuk mempertahankan keberhasilan ini dan mengatasi tantangan di masa depan, diperlukan upaya optimalisasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Untuk menghadapi tantangan peningkatan produksi perikanan kedepannya, ada beberapa Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Optimalisasi Teknologi dan Manajemen Budidaya :

- Mengadopsi teknologi modern dalam budidaya perikanan, seperti sistem akuakultur intensif atau semi-intensif, untuk meningkatkan efisiensi produksi.

- Melakukan pelatihan kepada petani ikan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen budidaya, pengendalian penyakit, dan pemeliharaan lingkungan.
- 2. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan :**
- Memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan berkualitas untuk mendukung produktivitas.
 - Mengelola lahan budidaya secara optimal dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
- 3. Mitigasi Risiko Cuaca Ekstrem :**
- Mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti kolam terpal atau sistem resirkulasi air (RAS).
 - Menyediakan asuransi pertanian untuk melindungi petani ikan dari risiko kerugian akibat bencana alam.
- 4. Peningkatan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan :**
- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan petani ikan untuk mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan akses pasar.
 - Memberikan insentif kepada pelaku usaha perikanan budidaya untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas.
- 5. Evaluasi dan Penyesuaian Target Secara Berkala :**
- Melakukan evaluasi berkala terhadap target produksi untuk memastikan bahwa target tetap realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, sedangkan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sektor pengolahan. Sedangkan Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan diformulasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan ralisasi Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.37 berikut ini:

Tabel 3.37
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor Industri pengolahan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rp.	730,85	759,55*	103,93%

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2023, terlihat bahwa capaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan lebih dari 100% dengan realisasi Nilai PDRB sebesar Rp. 759,55 Milyar pada tahun 2023, nilai ini kemungkinan akan meningkat di tahun 2024, seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca bencana.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2024

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rupiah	707,32	717,93	730,85	741,26	759,55	759,55	104,80%	105,80%	103,93%

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian Nilai PDRB sektor industri pengolahan selalu diatas 100% dengan nilai realisasi PDRB cenderung meningkat. Ini artinya kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan sudah dapat diprediksi sebelumnya dengan nilai proyeksi kurang progresif dibanding nilai realisasi. Untuk kedepannya, pada penyusunan Indikator Kinerja Utama RPJMD periode berikutnya, target Nilai PDRB sektor industri pengolahan akan ditingkatkan menyesuaikan dengan data realisasi saat ini dan beberapa tahun kebelakang.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berkiut ini :

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2022-2024 dengan
Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rupiah	707,32	717,93	730,85	741,26	759,55	759,55

Nilai realisasi PDRB selalu meningkat tiap tahunnya dan selalu berada diatas target RPJMD, hal ini berarti realisasi kinerja PDRB sektor pengolahan tiap tahunnya berada diatas harapan pemerintah. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi khususnya sektor Industri pengolahan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan **Faktor Keberhasilan**

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

- a. Membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca bencana. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi (inflasi yang rendah) pada awal triwulan III tahun 2024.
- b. Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM melalui dana DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM dan DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM.
- c. Penataan Sistem pengelolaan data industri nasional (SIINas), memungkinkan program pemberdayaan industri nasional lebih merata dan dapat menyentuh IKM di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti program OVOP, Business Matching, dll

Faktor penyebab kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan.

- a. Masih rendahnya daya saing produk IKM yang disebabkan karena kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang masih rendah, terutama dalam hal :
 - Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
 - Penguasaan teknologi produksi
 - Pengembangan produk yang berorientasi pada mutu
 - Daya inovasi (diversifikasi produk dan pengembangan kemasan)
 - Pengembangan produk yang berbasis sumber daya lokal.
- b. Belum terwujudnya komitmen dan sinergitas kebijakan *stakeholder* dalam pengembangan IKM.
- c. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

Solusi

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.
- c. Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
- d. Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM sertadiversifikasi produk olahan
- e. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM
- f. Pengembangan dan peningkatan program-program cakupan pemberdayaan UMKM.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :

- Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 12.461.409.155, dengan realisasi sebesar Rp 12.142.367.154 Atau capaian 97,44 %
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 2,56 %

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Tabel 3.40
PROGRAM PENDUKUNG NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

NO	gram	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	terangan
1	Prog. Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
2	Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
		12.461.409.155	12.142.367.154	319.042.001	

3. *Indek Gini*

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Semakin kecil angka indeks gini akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di suatu wilayah yang semakin baik atau ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah yang semakin minim. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indek Gini sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan,

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Indek Gini pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.41 berikut ini:

Tabel 3.41
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Gini	Tanpa satuan	0,25	0,224	110,4

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Gini

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i

Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- i

Nilai indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, jika : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Gini pada tahun 2024 adalah 0,25 dan terealisasi 0,224 dengan capaian indikator kinerja adalah 110,4%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan atau kekayaan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara. Sebaran pendapatan atau kekayaan tersebut tidak akan merata antar individu. Akan tetapi, bisa menjadi masalah apabila perbedaan tersebut sangat besar. Perbedaan penyebaran pendapatan atau kekayaan tersebut dikenal dengan ketimpangan. Salah satu indikator yang mengukur ketimpangan adalah indeks gini.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Indeks Gini pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Gini	Tanpa satuan	0,25	0,25	0,25	0,246	0,259	0,224	101,63 %	96,40 %	89,60 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan angka Gini rasio dari 0,259 menjadi 0,224 meskipun terlihat kecil secara angka, menunjukkan adanya perbaikan penurunan ketimpangan. Penurunan sebesar 0,035 berdampak signifikan terutama pada kelompok rentan. Berdasarkan klasifikasi penilaian realisasi dan capaian tahun 2024, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Gini Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Gini	Tanpa satuan	0,25	0,25	0,25	0,246	0,259	0,224

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa hanya tahun 2023 saja target Indeks Gini yang tidak tercapai, sesuai target RPJMD yaitu terealisasi sebesar 0,259 dari yang ditargetkan 0,25. Namun untuk tahun 2022 dan 2024 target Indeks Gini yang telah ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai, diatas target RPJMD yaitu terealisasi sebesar 0,246 tahun 2022 dan terealisasi 0,224 tahun 2024 dari yang ditargetkan 0,25.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Index Gini Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Index Gini Tahun 2024 dengan target dan realisasi Target/Standar Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.44
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2024	Target/Standar Nasional 2024	PK 2024	Target/Standar Nasional 2024
Indeks Gini	Tanpa satuan	0,25	0,374-0,377	0,224	0,381

Realisasi Indeks gini Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan realisasi Nasional pada tahun 2024. Artinya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan lebih kecil dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi secara Nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Faktor keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Index Gini adalah :

a. Peningkatan SDM

Membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, meratakan kesempatan ekonomi.

- b. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan.
Memastikan bahwa semua kelompok pendapatan memiliki akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- c. Pembangunan Infrastruktur pedesaan dan proyek padat karya
Meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan atau terpencil.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indek Gini adalah :

- a. Struktur ekonomi yang tidak inklusif, sehingga ketimpangan pendapatan yang meningkat
- b. Kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, distribusi lapangan kerja yang lebih mendukung kelompok tertentu dapat meningkatkan ketimpangan.
- c. Kebijakan redistribusi yang kurang efektif, kebijakan seperti bantuan sosial atau subsidi mungkin belum menyasar secara optimal kelompok miskin.

Solusi

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan redistribusi
- b. Penciptaan peluang ekonomi inklusif
- c. Sinergitas pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

- a. Peningkatan kualitas SDM
- b. Peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan UMKM, teknologi untuk petani dan nelayan
- c. Prioritas anggaran pada program yang menekan ketimpangan seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, program padat karya, fokus pada infrastruktur pelayanan dasar dan jalan, jembatan dan fasilitas publik

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indek Gini adalah :

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Rp.2.983.050.000
- Program penyelenggaraan jalan Rp.65.563.563.200
- Program pengelolaan pendidikan Rp. 119.410.758.917
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp. 118.636.953.161
- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Rp. 900.000.000
- Program penanganan kerawanan pangan Rp. 32.999.750

- Program Rehabilitasi Sosial Rp. 463.987.797
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 104.964.610
- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Rp. 22.412.090
- Program pengelolaan perikanan budidaya Rp. 633.603.766
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Rp. 120.010.914
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Rp. 650.000.135
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Rp. 60.000.000
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Rp. 715.400.212
- Program perencanaan dan pembangunan industri Rp. 3.180.500.000
- Program pengembangan kawasan transmigrasi Rp. 99.999.860

Sasaran 6 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahtera Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (indikator kinerja), yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, dengan banyaknya kawasan destinasi pariwisata yang tumbuh di Kabupaten Pesisir Selatan yang di kelola oleh swasta dan termasuk yang di kelola oleh pemerintah daerah merupakan pemasukan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa memberikan tambahan PAD bagi daerah selain dari PAD yang lain.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan ralisasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 berikut ini:

Tabel 3.45
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kontribusi
Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	2,7	2,06	76,30

Formulasi capaian indikator kinerja Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Jumlah PAD sektor pariwisata dibagi PAD x 100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 adalah 2,7 dan terealisasi 2,06 dengan capaian indikator kinerja adalah 76,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Berhasil** dengan predikat **Baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023, belum dapat dibandingkan karena Indikator ini adanya pada tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2022-2024 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan Target Target/Standar Nasional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD adalah :

- a. Percepatan infrastruktur yang mendukung kawasan pariwisata strategis
- b. Trend promosi pariwisata melalui berbagai media di internet.
- c. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menyiapkan iven berbasis potensi Nagari.

Tabel 3.46
Daftar Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

NO	NAMA POKDARWIS	ALAMAT	DAYA TARIK WISATA
1	2	3	4
1	POKDARWIS CAROCOKPANTAI PAINAN	Carocok Painan Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	Wisata Pantai, Pulau, Atraksi Bahari, Permainan Anak2, Kuliner, dll
2	POKDARWIS GUNJANTINO	Nagari Puluik2 Kec. Ampek Nagari Bayang Utara	Trecking, Alam/Pegunungan
3	POKDARWIS BATU PUTIINDAH	Nagari Api-api Kec. Bayang	Pantai/Bahari
4	POKDARWIS NAGARI SAGO	Nagari Sago, Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
5	POKDARWIS NAGARI SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
6	POKDARWIS SAKO INDAHALAMI	Nagari Sei. Gambir Sako Kec.Ranah IV Hulu Tapan	Alam / pegunungan
7	POKDARWIS BAHARI MADHANI	Nagari Sei. Nyalo Mudiak AieKec. Koto XI Tarusan	Wisata Bahari
8	POKDARWIS MANDEH	Nagari Mandeh Kec. Koto XITarusan	Wisata Bahari
9	POKDARWIS SARASAH KAMUMUAN	Nagari Salido Sari Bulan Kec.IV Jurai	Alam/Pegunungan, Terowongan, PLTA
10	POKDARWIS KMB CAROCOK ANAU	Nagari Carocok Anau Kec.Koto XI Tarusan	Perahu wisata
11	POKDARWIS TANSRIDANO	Nagari Taluk Kec. BatangKapas	Pantai / Bahari
12	POKDARWIS LABUANG BARUAK	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Pantai / Bahari / Pegunungan
13	POKDARWIS LASKAR PEDULI LINGKUNGAN	Nagari Amping Parak, Kec. Sutera	Konservasi lingkungan, penangkaran penyu, mangrove, pantai dan perahu wisata
14	POKDARWIS WASTAM	Nagari Limau Gadang LumpoKec. IV Jurai	Konservasi TNKS, Air Terjun, Sungai, Arung Jeram dan Trecking



15	POKDARWIS SUTA MANDIRI	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Pantai, wisata air dan Atraksi wisata,
16	POKDARWIS EKO WISATAIKAN LARANGAN	Nagari Kambang Timur, Kec. Lengayang	Embung, Ikan larangan, atraksi wisata
17	POKDARWIS MUARA KANDIH	Nagari Muara Kandis Punggasan Kec. Linggo Saribaganti	Jembatan Pelangi, Sungai dan Atraksi
18	POKDARWIS MOELATIMAS	Nagari Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan	Pantai Taluk Sikulo, Pantai Batu Kalang
19	POKDARWIS BATU BAIDUANG	Nagari Pancuang Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara	Negeri diatas awan, pegunungan, kuliner kacang dilan
20	POKDARWIS TALUN 7 BIDADARI	Nagari Inderapura SelatanKec. Pancung Soal	Air terjun 7 bidadari
21	POKDARWIS SIGUNTURTUA	Nagari Siguntur Tua Kec. Koto XI Tarusan	Air terjun SarasahSiguntur Tua
22	POKDARWIS KARANGPUTIH KAPUJAN	Nagari Kapujan Koto BerapakBayang, Kec. Bayang	Air Terjun, alam yg indah dan kuliner
23	POKDARWIS ANUGERAH PANTAI	Nagari Pasar Lama Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner
24	POKDARWIS GUNJANG GADANG	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner
25.	POKDARWIS PESONA TIMBULUN	Nagari Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai	Air Terjun, alam yg indah, kuliner dan seni budaya
26	POKDARWIS LE PARADIS . SP	Nagari Sungai Pinang MandehKec. Koto XI Tarusan	Ekowisata mangrove, pantai, selam, dan surfing
27	POKDARWIS RUMAH GADANG MANDE RUBIAH	Nagari Lunang Kec. Lunang	Wisata Budaya, Sejarah dan Makam Raja-raja
28	POKDARWIS SARIAK GEOPARK	Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih	Wisata alam, mangrow, geopark dll
29	POKDARWIS TARATAK SEPAKAT WISATA	Nagari Taratak Kec. Sutera	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang Kebun Lengkek, Durian, dan Kuliner
30	POKDARWIS SINAR UTAMA	Nagari Pondok Parian Kec. Lunang	Tabek/Embung, Agro Wisata, dll
31	POKDARWIS TELUK KUALO INDRAPURA	Nagari Teluk Kec.	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang, Kebun Lengkek Durian

		Airpura	dan Kuliner
32	POKDARWIS BOAT WISATABATU KALANG	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Boat Wisata Teluk Sikulo
33	POKDARWIS BALAI LAMO SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai, Kuliner dan Seni Budaya
34	POKDARWIS MUARO BANTIANG	Nagari Pulau Karam AmpangPulai Kec. Koto XI Tarusan	Pantai, Kuliner dan Seni Budaya
35	POKDARWIS NAGARI KOTO BARU KOTO BARAPAK	Nagari Koto Baru Koto Barapak Kec,. Bayang	Air Terjun, Treking, Kolam Pemandian, Seni Budaya dan Kuliner

Faktor penyebab kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD antara lain :

1. Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata
3. Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat bencana alam, terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan menuju kabupaten pesisir selatan, setelah itu terjadi lagi bencana yang lebih besar di kabupaten agam yang menambah tidak dapatnya wisatawan berkunjung ke kabupaten pesisir Selatan, sebab wisatawan yang datang berwisata ke kabupaten pesisir sealatan kebanyakan dari daerah pekanbaru dan sekitarnya yang melewati Kabupaten Agam.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD antara lain :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan penyelenggara diklat yang terakreditasi untuk mendapatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
2. Menciptakan inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.
3. Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata.
4. Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Lokal Pasca Bencana.
5. Pengembangan ekonomi Nagari dengan kemitraan dan BUMNag yang berfokus pada pariwisata.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

Pagu Anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan ini sebesar Rp. 7.503.542.950,- dengan realisasi sebesar Rp.6.976.476.303,- atau sebesar 92,98%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp.527.066.647,- atau 7,02%.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,385,791,994	1.048.985.407	336.806.587	APBD
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	375,281,487	365.094.377	10.187.110	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4,741,005,729	4.651.169.269	89.836.460	APBD
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100,007,350	99.950.400	56.950	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	901,456,390	811.276.850	90.179.540	APBD
Total		7.503.542.950	6.976.476.303	527.066.647	

Penghargaan

Adapun Penghargaan yang diperoleh adalah Desa Wisata Amping Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagai 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia oleh Kementerian Pariwisata..



Sasaran 7 : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pencapaian SPM.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.48
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00	91,57	130,81%

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar X
bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima
layanan dasar X Bobot penerima layan (80%)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja indeks Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 70,00 dan terealisasi Tinggi 91,57% dengan capaian indikator kinerja adalah 130,81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasi** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi Indeks Pencapaian SPM tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022-2024 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan Target Target/Standar Nasional

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu tujuan negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang bagaimana Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Untuk

menjalankan fungsi tersebut diperlukan suatu pedoman penjaminan mutu

pendidikan yang mampu menggiring proses pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian Indeks Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah menjadikan Standar Pelayanan Minimal sebagai indikator dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan
2. Perlunya persamaan persepsi antara pimpinan perangkat daerah dan staf terkait pencapaian standar pelayanan minimal.
3. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendampingi Pembelajaran Anak di luar sekolah;
4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi guru;
5. Meningkatkan peran sawasta dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasana pendidikan melalui dana CSR;

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Indeks Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Daerah Rawan Bencana, sehingga mengakibatkan spras rusak dan terganggunya proses pembelajaran;
2. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan disebagian satuan pendidikan;
3. Kualitas tenaga pendidik belum maksimal;
4. Masih banyak masyarakat kurang mampu;
5. Kemampuan Literasi dan Numerasi masih kurang
6. Masih terbatasnya akses transportasi umum ke sekolah.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pencapaian indek pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Melaksanakan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) dengan membentuk komunitas belajar (Kombel) sesuai minat dan bakat siswa;

4. Mengoptimalkan transportasi umum untuk anak sekolah di beberapa kecamatan yang kesulitan akses dan ekonomi;
5. Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi
6. Mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam rangka pendampingan dan pengawasan peserta didik di luar sekolah;
7. Mengaktifkan kembali peran dewan pendidikan dan stakeholder dalam perencanaan sektor pendidikan

Pagu anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM sebesar Rp.149.556.770.199,- dengan realisasi sebesar Rp.130.197.120.476,- atau sebesar 87,06%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.359.649.724,- atau 12,94 %.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Program yang menunjang pencapaian Indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM pada tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator
Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	147,505,671,548	128,525,224,236	18,980,447,312	APBD
2	Program Pengembangan Kurikulum	290,025,170	257,816,455	32,208,715	APBD
3	Program Pengembangan Kebudayaan	1,385,791,994	1,048,985,407	336,806,587	APBD
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	375,281,487	365,094,377	10,187,110	APBD
	Jumlah	149,556,770,199	130,197,120,476	19,359,649,724	

Sasaran 8 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.50

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM

Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,776 dan terealisasi 3,770 dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87%, yang merupakan realisasi 2023, karena sampai Laporan ini disusun BRIN belum merilis data 2024. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktifitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. IDSD menjadi alat strategis untuk menilai keberhasilan suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing Nasional.

Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu kepada global competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

1. Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

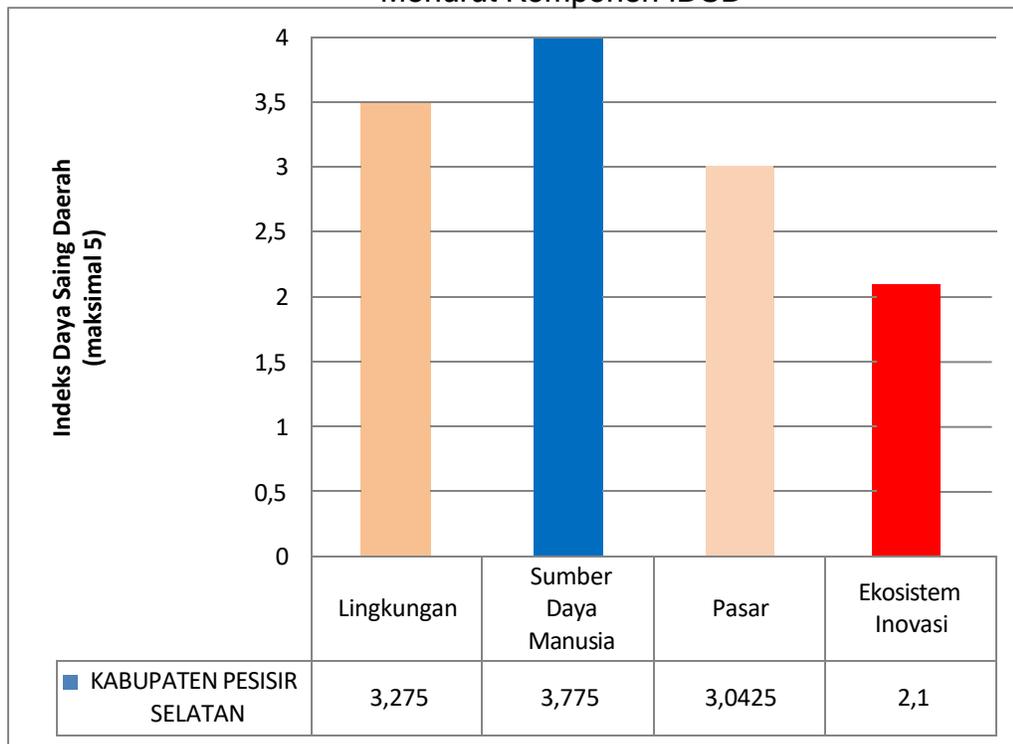
4. Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang

mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

IDSD menjadi alat penting yang mampu memonitor dan mengevaluasi upaya pengoptimalan potensi tersebut secara komprehensif. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan IDSD tidak hanya untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan itu sendiri. Singkatnya, dengan menggunakan IDSD sebagai rujukan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangan dan pada saat yang bersamaan, memperkuat keunggulan daya saing wilayahnya.

Gambar 3.12
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
Menurut Komponen IDSD



Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing adalah Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia. Pengukuran IDSD Bidang SDM

menggunakan 2 pilar yaitu Kesehatan dan Keterampilan dengan 7 indikator sebagai berikut :

Tabel 3.51
Indikator Pilar Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2023*

No.	Pilar	Dimensi	Indikator	Nilai Indeks	Rata-Rata Nilai Indeks	IDSD Bidang SDM
1.	Kesehatan	Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	3,94	3,94	3,77*
2.	Keterampilan	Tenaga Kerja saat ini (Current workforce.)	1. Rata-rata tahun sekolah	2,84	3,61	
			2. Keterampilan lulusan	3,29		
			3. Kemudahan menemukan pekerja terampil	3,33		
		Tenaga kerja masa depan (Future workforce)	4. Angka harapan sekolah	3,82		
			5. Berpikir kritis dalam mengajar	3,79		
			6. Rasio murid-guru pendidikan dasar	4,57		

Sumber : Metadata Indikator IDSD Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023*

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 didapat 3,77 dari skala 5. Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandarisasi dengan rumus min-max sehingga

didapat skor 0-5. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan

bobot yang sama dalam perhitungan skor Indeknya. Jika dilihat dari capaian indikatornya skor yang tertinggi adalah Rasio murid terhadap guru dengan

skor 4,57 sedangkan yang paling rendahnya adalah Rata-rata tahun sekolah dengan skor 2,84.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Indeks Daya Saing daerah Bidang SDM pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa satuan	Tinggi (3,20)	Tinggi (3,35)	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,55)	Tinggi (3,77)	Tinggi (3,77)*	110,93%	112,53%	99,87%*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,775 dan terealisasi 3,770* dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87%. yang merupakan capaian 2023 karena Data Tahun 2024 belum dirilis oleh BRIN. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi

Indikator Kinerja Indeks Daya saing daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dengan
Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa satuan	Tinggi (3,20)	Tinggi (3,35)	Tinggi (3,50)	Tinggi (3,55)	Tinggi (3,77)	Tinggi (3,77)*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,50 dan terealisasi 3,77 dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87% yang merupakan capaian 2023 karena Data Tahun 2024 belum dirilis oleh BRIN. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024 dengan Target/Standar Nasional

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan dengan Target/Standar Nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Faktor Keberhasilan

Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Banyak faktor penentu mendorong produktivitas dan daya saing daerah, namun faktor yang menentukan keberhasilan capaian Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat.
- b. Angakatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas
- c. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- d. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja.
- e. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
- b. Masih kurangnya kapasitas tenaga kesehatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
- c. Masih rendahnya rata-rata tahun sekolah, lebih fokus pada pencegahan dropout atau kurang minatnya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi
- d. Keterampilan masyarakat masih rendah, perlunya peningkatan pemerintah dalam memberikan kemampuan masyarakatnya dalam keterampilan lulusan sekolah termasuk keterampilan dalam teknologi digital.
- e. Kurangnya usaha dalam menyediakan tenaga kerja terampil, sehinggasaat ini masih sulit ditemukan pekerja terampil, sehingga masih sering mendatangkan pekerja terampil dari luar daerah
- f. Dalam mengajar tenaga pendidik belum didorong untuk belajar kritis dan inovatif sehingga bisa berperan positif bagi dirinya sekligus anak didiknya.

Solusi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas seperti, Penyediaan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan primer, vaksinasi, perawatan maternal dan anak, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- b. Meningkatkan Gizi dan Kualitas Hidup dengan cara Sosialisasi dan sentuhan bantuan langsung terhadap kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang, akses terhadap makanan berkualitas, dan peningkatan
- c. gizi pada masa kanak-kanak dapat membantu mencegah berbagai penyakit terkait gizi dan meningkatkan kekebalan tubuh.
- d. Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih. Perangkat daerah secara crosscutting melaksanakan program terhadap penyediaan fasilitas sanitasi yang

- memadai dan akses terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi dapat mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dengan membangun dan memperluas jaringan sekolah.
 - f. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan lainnya;
 - g. Meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga pendidik. Program-program pendidikan non-formal juga dapat ditawarkan untuk mereka yang sudah tidak sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
 - h. Menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesional masyarakat dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pasar kerja lokal dan regional. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan teknis seperti teknologi informasi, keahlian kerajinan, keterampilan pertanian, dan lain-lain.
 - i. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan program pelatihan dan magang kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Ini dapat membantu memastikan bahwa keterampilan yang dipelajari oleh masyarakat sesuai dengan permintaan pasar kerja.
 - j. Mendirikan pusat-pusat keterampilan dan inovasi di daerah untuk memberikan akses terhadap pelatihan, sumber daya, dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru dan mempromosikan inovasi.
 - k. Mendorong literasi digital di kalangan masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Hal ini penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan
 - l. Mendukung program pengembangan kewirausahaan untuk membantu masyarakat memulai usaha mereka sendiri. Ini dapat mencakup bantuan dalam perencanaan bisnis, akses ke modal usaha, pelatihan manajemen, dan dukungan lainnya untuk membangun dan mengembangkan bisnis lokal.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

SDM dan Anggaran untuk pembinaan dan upaya menaikkan daya saing daerah tidak diberikan secara khusus, pada salah satu OPD, akan tetapi menjadi kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah, dan sifatnya optimalisasi dari anggaran dan SDM yang sudah ada pada

Program kegiatan lainnya.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Pencapaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah di Bidang Sumber Daya Manusia didukung oleh Program dan Kegiatan dilingkup urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Program dan kegiatan sebagai berikut;

Tabel 3.54
Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (Rp.)
1.	Program: Penelitian dan Pengembangan Daeah Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.073.787	21.383.600	71,10 %

Sumber; DPA Bapedalitbang Tahun 2024

Dalam DPA Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah di alokasi anggaran sebesar Rp. 30.073.787,- (tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Daya Saing Dearah, Indek Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena Pengukuran IDSD tahun 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) sebagai produsen data indikator daya saing, anggaran tersebut tidak terdistribusikan dalam bentuk pengukuran IDSD, tapi terdistribusi kedalam bentuk kegiatan yang telah

dilakukan meliputi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah. Dari anggaran yang dialokasikan terealisasikan sebesar Rp. 21.383.600,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau capaian 71,10 %, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 8.690.187,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 28,90 %

Penghargaan

Pencapaian IDSD bukan untuk mendapatkan hadiah, atau reward, akan tetapi sebagai upaya dari kalangan independen, ditugaskan oleh BRIN

yang melakukan survei secara mandiri, dan tidak dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemerintah daerah, akan tetapi menggunakan data-data yang berasal dari kementerian dan lembaga. Diharapkan Pemda dapat melakukan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang mendapatkan nilai masih rendah sehingga dapat lebih meningkatkan lagi pencapaian IDSD.

Sasaran 9 : Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.44 berikut ini:

Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34	97,83

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat

Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 adalah 72,92 dan terealisasi 71,34 dengan capaian indikator kinerja adalah 97,83%. Berdasarkan klasifikasi

penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, metode penghitungan indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu, kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Pengukuran Indeks Kebahagiaan Masyarakat dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, 2017 dan terakhir tahun 2021 yang digunakan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.45 di bawah ini.

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa satuan	69,92	71,42	72,92	71,34	71,34	7,34	102,03	99,89	97,83

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, tidak ada kenaikan jumlah realisasi indeks kebahagiaan masyarakat dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 memiliki nilai yang sama karena survei terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2021, untuk Capaian terjadi penurunan karena realisasi tetap dari tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa satuan	69,92	71,42	72,92	71,34*	71,34*	71,34*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, tidak ada kenaikan jumlah realisasi indeks kebahagiaan masyarakat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 memiliki nilai yang sama karena survei terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2021. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024 dengan Target/Standar Nasional.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan dengan Target/Standar Nasional, karena tidak merupakan merupakan target/standar Nasional.

Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan.

Faktor Keberhasilan.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Meningkatkan hubungan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya.
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan dinamis.

Faktor Penyebab Kegagalan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Masih rendah nya penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan belum maksimal, karena masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak ditanggung oleh BPJS APBD.
3. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia, teknologi maupun keuangan dalam mengintervensi kebijakan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Solusi

Beberapa Upaya yang dilakukan untu meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Pesisir antara lain :

1. Pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri dalam bentuk sentra.
2. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi,
3. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi.
4. Meningkatkan. Meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan holtikultura, serta komoditi hasil peternakan dan perikanan
5. Promosi pariwisata.
6. Meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
7. Melakukan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Menginformasikan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PprPA) sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak.
9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Pagu Anggaran untuk mendukung Indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat sebesar Rp849,905.032,- dan terealisasi sebesar Rp831.956.566,- atau sebesar 97,89%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar

Rp.17.984.466 atau 2,11%.

Program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target anggaran Rp819.905.712 dan realisasi sebesar Rp.802.179.766 atau capaian 97,84%.
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target anggaran Rp.29.999.320 dan realisasi sebesar Rp.29.776.800 atau capaian 99,26%.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tercantum pada tabel 3.58 dibawah ini:

Tabel 3.58
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Rp 1.375.821.305.216	Rp 1.183.196.669.802	86 %
2.	Meningkatnya Kualitas hidup manusia dan masyarakat	Rp 11.427.097.160	Rp 9.741.195.853	85,25 %
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rp 115.495.291.419	Rp105.491.665.912	91.34 %
4.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Rp 15.388.254.351	Rp14.002.926.253	91 %
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan	Rp 155.504.846.840	Rp 142.803.328.762	91,83 %
6.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	Rp 7.503.542.950	Rp 6.976.4.76.303	92,98 %
7.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Rp 147.957.181.471	Rp 51.559.876.286	34,87 %



8.	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Rp 10.440.818.515	Rp 10.104.221.248	96,78 %
9.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	Rp 63.745.801.245	Rp 62.562.095.567	98,14 %
Jumlah		Rp. 1.903.284.139.167,00	Rp. 1.586.478.455.986,16	83,35 %

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp1.903.284.139.167,00,- terealisasi sebesar Rp1.586.478.455.986,16,- atau 83,35%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp316.805.683.180,84,- atau 16,65%.
- b. Sisa anggaran sebesar Rp316.805.683.180,84,- atau 16,65%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian Sasaran**

Dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan, 4 (empat) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 110,23%, dengan nilai tertinggi adalah 130,81% yaitu sasaran “Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas”. Untuk nilai terendah dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 76,30% yaitu sasaran “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat”.

2. **Capaian Indikator Kinerja**

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 5 (lima) indikator kinerja belum mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 107,88%, dengan nilai tertinggi adalah 130,81% yaitu indikator kinerja “Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas”. Untuk nilai terendah indikator kinerja yang nilainya terendah 76,30% yaitu indikator kinerja Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat”.

3. **Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Belanja daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.586.478.455.986,16,- atau 83,35%. dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp1.903.284.139.167,00,- Dari 9 (sembilan) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis” yaitu 98,14% dan terendah adalah “Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas” yaitu 34,87%.**

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi

informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;

2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BUPATI PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd.**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawabkami.

Painan, 15 Oktober 2024

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BUPATI PESISIR SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	BB (72)
2.	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,74
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,4
4.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65
		2. Pengeluaran Per Kapita	Rp./Orang/Tahun	9.953.500
5.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15
		2. Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	10,879
		3. Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,25
6.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	Persen	2,7
7.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan		
		Indeks Pencapaian SPM	Tanpa Satuan	70,00
8.	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,775)
9.	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1. Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100.881.200,00	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.607.138.270,00	APBD
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	516.967.900,00	APBD
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	245.479.826,00	APBD
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	833.227.859,00	APBD
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	111.540.552,00	APBD
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.209.190,00	APBD
8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	262.499.840,00	APBD
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	101.171.327,00	APBD
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	375.281.487,00	APBD
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100.007.350,00	APBD
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	138.640.000,00	APBD
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.254.559.383,00	APBD
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	458.468.800,00	APBD
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.816.492.287,00	APBD
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.610.495.333,00	APBD
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	407.000.160,00	APBD
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.605.201,00	APBD
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	135.193.551,00	APBD
20	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.564.977.055,00	APBD
21	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	161.484.753,00	APBD
22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	59.999.880,00	APBD
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	114.664.491.619,00	APBD
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.871.310.889,00	APBD
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.595.474,00	APBD
26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900,00	APBD
27	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	70.324.923,00	APBD
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.737.367.705,00	APBD
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.700.000.000,00	APBD
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.411.000.000,00	APBD
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	267.999.892,00	APBD
32	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	619.615.000,00	APBD
33	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	999.993.629,00	APBD
34	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	47.000.000,00	APBD
35	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	41.805.800,00	APBD
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	819.905.712,00	APBD
37	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38.360.000,00	APBD
38	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.138.592.627,00	APBD
39	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	122.992.762,00	APBD
40	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	974.979.242,00	APBD
41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	2.762.000.000,00	APBD
42	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	3.041.130.130,00	APBD
43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.495.650.000,00	APBD
44	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.508.034,00	APBD
45	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	991.743.136,00	APBD
46	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.954.877.664,00	APBD
47	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.423.047.697,00	APBD
48	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	40.450.000,00	APBD
49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.201.858.743,00	APBD
50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	147.505.671.548,00	APBD
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	374.115.974,00	APBD
52	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.575.288.307,00	APBD
53	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.390.411.618,00	APBD

54	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	29.999.320,00	APBD
55	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.000.000,00	APBD
56	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.502.897.446,00	APBD
57	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.476.060,00	APBD
58	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	115.578.858,00	APBD
59	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	243.472.593,00	APBD
60	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	3.469.507.626,00	APBD
61	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	390.000.000,00	APBD
62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	APBD
63	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	89.999.888,00	APBD
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.385.791.994,00	APBD
65	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	290.025.170,00	APBD
66	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	592.964.653,00	APBD
67	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.506.740,00	APBD
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	901.456.390,00	APBD
69	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	15.000.000,00	APBD
70	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.382.600,00	APBD
71	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	243.358.000,00	APBD
72	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	APBD
73	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	632.472.830,00	APBD
74	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	873.181.075,00	APBD
75	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.390.141.976,00	APBD
76	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	283.315.042,00	APBD
77	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	62.889.550,00	APBD
78	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	705.000.000,00	APBD
79	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.741.005.729,00	APBD
80	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415,00	APBD
81	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.268.527.540,00	APBD
82	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	173.518.252,00	APBD
83	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	82.000.726,00	APBD
84	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	691.530.400,00	APBD
85	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	9.964.500,00	APBD
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.764.343.746,00	APBD
87	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	941.724.626,00	APBD
88	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	884.675.048,00	APBD
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.063.478.896.587,80	APBD
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.618.429.526,00	APBD
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	936.389.611,00	APBD
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	75.801.008.870,00	APBD
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.369.152.139,00	APBD
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186.123.612,00	APBD
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	441.951.405,20	APBD
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	831.384.300,00	APBD
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	57.579.802,00	APBD

98	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	114.709.640,00	APBD
99	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	476.484.908,00	APBD
100	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN	12.850.000,00	APBD
101	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.993.000,00	APBD
102	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	10.116.600.000,00	APBD
103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	794.411.883,00	APBD
104	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.435.409.155,00	APBD
105	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	247.251.830,00	APBD
106	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	399.990.934,00	APBD
107	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.007.630,00	APBD
108	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	178.933.195,00	APBD
109	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	300.520.201,00	APBD
110	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	145.077.856,00	APBD
111	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.943.637.880,00	APBD
112	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	158.367.000,00	APBD
113	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	51.085.000,00	APBD
114	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	176.280.474,00	APBD
115	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	372.331.000,00	APBD
116	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	29.499.610,00	APBD
117	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	283.356.097,00	APBD
TOTAL		1.903.284.139.168,00	

Painan, 15 Oktober 2024

Bupati Pesisir Selatan



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.